

Manajemen Kemitraan KPH dan Kelompok Masyarakat

Studi Banding Forum KPH Sumatera Selatan ke KPHL Wilayah I dan II Aceh



Dalam rangka mendorong KPH di Sumatera Selatan agar tidak tergantung pada dana APBN dan APBD, maka KPH diarahkan agar bisa mengembangkan dan menjalankan rencana bisnis dengan bermitra bersama masyarakat sekitar hutan atau melalui pendekatan *Community based Forest Management (CBFM)*. Unit-unit KPH yang ada di Sumatera Selatan akan terus di dorong untuk menghasilkan barang dan jasa dari segenap potensi yang ada di wilayah kerjanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan GIZ BIOCLIME mengadakan studi banding ke KPHL Wilayah I dan II Nangroe Aceh Darussalam pada tanggal 19 – 23 September 2016. Kegiatan ini melibatkan 17 orang peserta yang berasal dari KPHP dan KPHL di Sumatera Selatan, Kelompok Tani Hutan (KTH), BP DAS (Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai), Dinas Kehutanan, BPKH (Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan) dan GIZ Bioclimate. Adapun tujuan yang ingin dicapai yakni : (1) mendapat

wawasan dan pengetahuan mengenai mekanisme pengembangan bisnis KPH pola kemitraan beserta instrumen pendukungnya agar bisa diimplementasikan pada unit KPH di Sumatera Selatan, (2) mendapatkan gambaran proses penyusunan Organisasi Perangkat daerah (OPD) UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Aceh.

Dipilihnya lokus kegiatan ke Provinsi Aceh didasarkan pada pertimbangan bahwa KPH yang ada disana telah berhasil menjalankan kerjasama kemitraan dengan masyarakat dalam pengembangan HHBK dan jasa lingkungan serta telah menyumbang pendapatan untuk daerahnya. KPHL Aceh dalam hal ini, memiliki beberapa perkembangan terkait pola kemitraan dan perjanjian kerjasama yang sudah diterapkan bersama masyarakat lokal dan/atau koperasi.

Kegiatan diisi dengan diskusi dan curah pendapat dengan Dinas Kehutanan Provinsi Aceh, KPHL Wilayah I dan II serta dilakukan kunjungan lapangan ke mitra pelaksana kegiatan dengan KPH yakni ke sentra produksi

rotan di Kabupaten Pidie (kerjasama KPHL I, KSU Al-Afghani dan Dinas Perindustrian) serta Produksi Kopi Gayo Kualitas Ekspor (kerjasama KPHL II dan Koperasi Baburayan).

Pada akhir kegiatan, peserta melakukan diskusi untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna membangun payung hukum kemitraan KPH Sumsel dengan fokus pada : (1) aturan/payung hukum yang memungkinkan lahirnya pola kemitraan di Sumatera Selatan, (2) para pihak pemangku kepentingan/stakeholders terkait penyusunan payung hukum kemitraan, (3) komoditi prioritas di wilayah KPH yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi unit bisnis dengan pola kemitraan, dan (4) stakeholders yang berpotensi untuk bekerjasama dalam pengembangan unit bisnis.



Gambar 1. Foto bersama peserta studi banding dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh

Adapun tindak lanjut kegiatan adalah bahwa keseluruhan data dan informasi yang

diperoleh akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan Organisasi Perangkat Daerah UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan penyusunan instrumen pendukung percepatan operasionalisasi KPH di Sumatera Selatan, khususnya dalam pengembangan bisnis HHBK dan Jasa Lingkungan dengan pola kemitraan.



Gambar 2. Kopi Organik Gayo. Dikembangkan dengan pola kemitraan KPHL II Aceh dengan Koperasi Baburayan

Kontak :

- Nyimas Wardah /nyimas.wardah@giz.de
- Ardisson Santosa – Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan/ardisons@gmail.com

